

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan adalah penyampaian informasi sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah berupa laporan atas pelaksanaan kegiatan yang mencakup neraca, laporan realisasi, arus kas dan catatan laporan keuangan yang merupakan bagian dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan telah memnuhi aturan akuntansi pemerintahan dalam penyusunannya. Pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan ini digunakan untuk memberikan pertimbangan manajemen dalam melakukan pengambilan keputusan dalam hal perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, dan evaluasi.

Pemerintah daerah menyusun laporan keuangan untuk digunakan oleh pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan berupa pengendalian, pelaksanaan, perencanaan, dan evaluasi tujuan kinerja pemerintah. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan No. 71 tahun 2010, tingginya kualitas sebuah laporan keuangan dapat terlihat dari adanya relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami, yang merupakan 4 karekateristik dari sebuah laporan keuangan. Hal tersebut juga menunjukkan kapabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dengan tertib dan dapat menggunakan anggaran yang tepat untuk menjadikan lebih baik lagi laporan keuangannya.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 saat ini sedang ditegakkan oleh pemerintah, dimana peraturan tersebut membahas mengenai Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui ketentuan ini, diharapkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan laporan keuangan dapat dijamin oleh pemerintah untuk penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu dan berkualitas. Baiknya pengelolaan laporan keuangan daerah diartikan sebagai kemampuan pemerintah untuk tetap menerapkan standar akuntanti pemerintahan untuk membuat laporan keuangan pemerintah yang berkualitas sesuai dengan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),

memungkinkan kepercayaan pemerintah daerah di seluruh lapisan masyarakat. Laporan keuangan daerah yang memiliki kualitas baik tentunya tidak dapat dilaksanakan secara efektif jika tidak diiringi dengan adanya sumber daya manusia dengan pemahaman mengenai kualitas akuntansi pemerintahan dan keuangan daerah serta berkompeten untuk mendukung terciptanya LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) yang berkualitas. Sebaik apapun sebuah sistem, tetap saja sia-sia tanpa dukungan kualitas dari sumber daya manusia yang ada, terutama dalam aspek pengalaman, pendidikan, dan pelatihan, yang merupakan kualitas individu dari sumber daya manusia (Indriasih, 2014).

Badan pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Nusa Tenggara Timur pada saat pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Wajar dengan pengecualian, untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2014 di Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Manggarai Barat (Badan Pemeriksaan Keuangan, 2015). Akun-akun yang dikecualikan dari kewajaran LKPD tahun 2014 adalah piutang pajak PBB-P2, piutang pemberdayaan, investasi tidak tetap dalam bentuk gulungan ternak, tanah, peralatan, aset tetap mesin, serta bangunan dan gedung. Sedangkan rekening-rekening yang dibebaskan dari kewajaran LKPD tahun 2014 di Kabupaten Manggarai Barat adalah PDAM Wae Mbeliling, aktiva tetap, dan penyertaan modal dalam biaya tenaga kerja pada pelayanan dinas PPO. Kepatuhan pada ketnetuan peraturann perundang-undangan dan sistem pengndalian internal diperiksa oleh BPK untuk mendapatkan kepercayaan yang cukup berdasarkan wajarnya laporan keuangan. LHP LKPD memiliki bagian yang tidak terpisahkan di dalamnya, yaitu LHP keparuhan dan LHP sistem pengndalian internal. Lapoaran keuangan pemerintah daerah yang berkualitas memegang peranan penting, hal tersebut karena pihak-pihak yang berkepentingan akan menjadikan lapran keuangan yang dibuat sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Menurut Mulyati, Faridah dan Prawiranegara, (2019) menyatakan bahwa pada pemerintah, laporan keuangan daerah adalah sebuah keharusan yang wajib dibuat untuk mempertanggungjawabkan kegiatan keuangan itu kepada masyarakat umum, maka dari itu laporan keuangan pemerintan perlu memperhatikan kualitas informasi di dalamnya.

Menurut penelitian Oman, (2019) teori keagenan adalah teori yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen. Pemerintah sebagai pemegang amanah (agent), mempunyai kewajiban kepada orang-orang yang menjadi pemberi amanat (prinsipal) untuk membuat, melaporkan dan memberitahukan segala kegiatan yang akan dilakukan dan untuk itu mereka bertanggung jawab. Orang-orang berhak untuk menuntut pertanggungjawaban seperti itu. Menurut teori keagenan, dalam prakteknya terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, sehingga adanya konflik kepentingan atau masalah keagenan. Seperti fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya hal ini sangat berkaitan dengan teori keagenan karena masalah tersebut menimbulkan konflik kepentingan yang dapat merugikan masyarakat. Untuk mengurangi konflik, perlu adanya pengawasan oleh prinsipal yang harus memantau tindakan agen. Laporan keuangan adalah alat pemantauan yang mengurangi biaya agensi.

Penelitian ini akan membahas beberapa hal yang dapat berdampak pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor pertama adalah kompetensi atau kemampuan dari sumber daya manusia. Laporan keuangan disebutkan oleh Roviyantie, (2011, dalam Rahmadani, 2015) harus dikerjakan oleh orang yang memiliki disiplin ilmu dalam bidang akuntansi. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan serta instansi pemerintah daerah akan dipengaruhi oleh tenaga kerja dan sumber daya manusia yang kompeten. Diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki pemahaman di bidang akuntansi pemerintah bahkan keuangan organisasi untuk dapat menciptakan kualitas dari sebuah laporan keuangan pemerintah daerah. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Armel, (2017) menyimpulkan bahwa kemampuan sumber daya manusia memberikan signifikansi pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2017) menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang diberikan kemampuan sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain faktor kemampuan Sumber Daya Manusia, hal lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah sistem pengendalian internal. PP No. 60 Tahun 2008 mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai keseluruhan proses tindakan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh manajemen dan seluruh karyawan, memberikan jaminan yang cukup untuk operasi yang efisien dan efektif. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dinilai dari kualitas pengendalian internal pemerintah daerah. Apabila sistem pengendalian internal rendah atau lemah, sulit untuk mendeteksi kecurangan dalam proses penyusunan laporan keuangan, dan bukti audit yang diperoleh dari informasi/data akuntansi oleh pemerintah daerah tidak memenuhi syarat. Sistem pengendalian internal tidak dapat mengesampingkan kesalahan atau kemungkinan kesalahan, tetapi semua sistem pengendalian internal yang baik dapat membatasi batas yang dapat dianggap wajar dengan terjadinya kesalahan, dan jika memang terjadi. Ini akan segera diidentifikasi dan diselesaikan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Armel, (2017) menyimpulkan bahwa terdapat signifikansi pengaruh yang diberikan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Sebaliknya, pada penelitian Philadelphia, Suryaningsum, dan Sriyono (2020) menyimpulkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berdampak pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, ketertarikan muncul pada peneliti untuk meneliti mengenai “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah pada penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh yang diberikan kompetensi sumber daya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah terdapat pengaruh yang diberikan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dampak Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan
2. Untuk mengkaji dampak Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam suatu studi terdapat beberapa manfaatnya yaitu :

1. Manfaat Akademis

Hasil studi ini diharapkan dapat memberikan makna terhadap dampak sistem pengendalian internal di bidang akuntansi sektor publik, khususnya pada laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

Dapat mengaplikasikan teori yang didapat dalam perkuliahan yang sebenarnya untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam menganalisa masalah.

1.5 Sistematika Penulisan Proposal

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bagaimana pertanyaan itu dirumuskan, tujuan penelitian, bagaimana itu terbentuk, dan mengapa itu bermanfaat. Sistematis penulisan juga dibahas dalam bab ini, karangan yang panjang.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan uraian yang berkaitan dengan landasan teori penelitian yang dilakukan, penelitian sebelumnya, pengembangan hipotesis, dan model penelitian/kerangka konseptual.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Yang dibahas dalam bab 3 adalah variabel-variabel yang diukur; sumber data yang dikumpulkan; jenis data yang dikumpulkan; metode pengumpulan data; dan bagaimana cara mempelajari teknik analisis untuk melakukan penelitian.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Di antara topik yang dibahas dalam bab 4 adalah hasil analisis yang diantisipasi, deskripsi data, hasil dari pengolahan data, dan pembahasan studi yang dilakukan.

BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab terakhir yaitu bab 5, memberikan ringkasan temuan dan rekomendasi atau kontribusi untuk makalah penelitian yang telah selesai.